

STRATEGI KOMUNIKASI MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN

Parlaungan Adil Rangkuti

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga, Kotak Pos 220 Bogor 16002
Telp.(0251) 8621210, Faks.(0251) 8623203, E-mail: fateta@fateta-ipb-ac-id

Diajukan: 7 April 2009; Diterima: 8 Mei 2009

ABSTRAK

Peran komunikasi pembangunan pertanian makin penting dalam mewujudkan swasembada pangan dan diversifikasi pangan sebagai landasan terciptanya kemandirian pangan dan ketahanan pangan yang andal. Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pembangunan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat sebagai bentuk kesadaran untuk membangun usaha tani modern dengan didukung strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Adopsi inovasi teknologi akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, menekan susut, meningkatkan nilai tambah dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi petani serta memperkuat kelembagaan dan daya saing. Dalam pemberdayaan petani, pengembangan koperasi agribisnis komoditas tunggal seperti koperasi agribisnis padi atau jagung akan mempermudah transformasi informasi paket teknologi dan manajemen usaha tani dari berbagai sumber ke petani. Untuk membangun kemandirian pangan berbasis produksi lokal dan diversifikasi pangan dengan dukungan sistem komunikasi yang efektif diperlukan kebijakan pemerintah dengan mengembangkan pusat-pusat informasi pertanian pada sentra produksi sebagai kawasan pengembangan agribisnis (KPA). Sistem informasi komunikasi berbasis koperasi dan modal sosial dengan pendekatan kemitraan dari semua *stakeholders* (pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga sosial kemasyarakatan dan sebagainya) akan mempercepat terwujudnya kemandirian pangan daerah.

Kata kunci: Kemandirian pangan, keberdayaan petani, komunikasi pertanian

ABSTRACT

Communication strategy in developing food independency

Role of agricultural development communication is important to build food self-sufficiency and diversification as the main base of food independency and food security. Food independency will be accomplished if its development comes from people initiative as an awareness to build modern farm industry with effective and efficient communication strategy support. Adoption of innovation technology by means of communication will boost productivity and product quality, decrease loss of production, increase value added of production with farmer empowerment and participation approach, and strengthen farmers' institutions and competitiveness. To empower the farmers, development of single commodity agribusiness cooperation such as rice or maize will facilitate transformation of information on technology and farm management from variety of sources for the farmers. Government policy to develop centers of agricultural information at production centers as agribusiness development area is required to build food independency and food diversification based on local production with effective communication system support. Communication information system based on cooperation and social capital with stakeholders partnership approaches (government, businessmen, university, research and development institutions, social institutions, etc) will accelerate accomplishment of food independency in suburb areas.

Keywords: Food independency, farmers empowerment, agriculture communication

Kecukupan beras sebagai bahan pangan pokok selalu menjadi isu politik dalam mendukung kebijakan pemerintah sejak awal kemerdekaan. Presiden Pertama RI Soekarno memberi perhatian besar dalam pembangunan pertanian, dan menyatakan bahwa pertanian merupakan soal hidup atau mati dari bangsa dan negara Indonesia karena

menyangkut makanan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (yang pada tahun 1964 menjadi Institut Pertanian Bogor) pada tanggal 27 April 1952 (Pakpahan 2004). Organisasi pangan dunia Food and Agriculture Organization (FAO) juga memberi perhatian terhadap

pangan dengan menggalang komitmen politik masyarakat internasional untuk mengatasi kelaparan dan mengentaskan kemiskinan melalui Konferensi Tingkat Tinggi *World Food Summit: five years later* pada bulan Juni 2002 di Roma, Italia (FAO 2003).

Era komunikasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (iptek), termasuk teknologi komunikasi dan informasi, telah menciptakan masyarakat informasi dan pengetahuan yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi dan sosial. Pertemuan ke-9 PBB pada tanggal 6–9 September 2004 di Roma, Italia menetapkan pentingnya komunikasi pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan tiga isu penting, yakni: 1) komunikasi dan sumber daya alam, 2) komunikasi untuk penelitian, penyuluhan dan pendidikan, serta 3) komunikasi untuk daerah yang terisolir dan kelompok terabaikan. Pertemuan tersebut merekomendasikan beberapa aspek yang terkait dengan peningkatan peran komunikasi pembangunan, antara lain pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, adopsi inovasi teknologi, dan perubahan sosial yang terkait dengan globalisasi dan kultur lokal.

Kemandirian pangan dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menjamin seluruh penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup dengan mutu yang layak dan aman. Untuk mewujudkannya diperlukan dukungan kebijakan untuk mempercepat pembangunan usaha tani tanaman pangan khususnya padi. Usaha tani tanaman pangan dilaksanakan oleh sekitar 21 juta rumah tangga petani berlahan sempit dengan aksesibilitas pada sumber permodalan, teknologi, dan sarana produksi yang terbatas. Tanpa fasilitasi pemerintah, sulit bagi usaha tani tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya (Alimoeso 2008).

Salah satu masalah yang dihadapi petani di pedesaan adalah rendahnya akses dan kemampuan dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan usaha tani padi dalam upaya meningkatkan produktivitas, kualitas produk, daya saing, dan nilai tambah. Petani membutuhkan informasi secara tepat, cepat, dan mudah agar usaha tani padi makin maju seiring dengan perkembangan teknologi dan manajemen agribisnis padi yang makin kompetitif.

KEMANDIRIAN PANGAN

Kebijakan yang berkaitan dengan kemandirian pangan telah mewarnai kebijakan pemerintah di bidang pertanian dan pangan sejak tahun 1970-an dan menjadi sorotan sejak Kongres XI Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) dan Kongres *Asian Society of Agri-*

cultural Economist (ASAE) di Bali pada tahun 1986. Perhatian pemerintah terhadap kemandirian pangan yang makin besar ditandai antara lain dengan tema Hari Pangan se-Dunia tahun 2006 yaitu *Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Pedesaan*, mengiringi tema Hari Pangan Dunia yakni *Investing in Agriculture for Food Security*. Kemandirian pangan dapat ditelaah melalui empat aspek, yaitu kebijakan pangan nasional, swasembada beras, ketergantungan pangan impor, dan pemberdayaan petani (Suryana 2008).

Kebijakan Pangan Nasional

Jumlah penduduk dunia yang bertambah sekitar 30–75 juta/tahun pada tahun 2000–2030, diperkirakan akan membutuhkan tambahan sereal 1 miliar ton per tahun pada 2030, atau meningkat 59% dibandingkan dengan produksi sereal tahun 2000 (Nainggolan 2007). Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri perlu dioptimalkan kinerja sistem ekonomi pangan, yang meliputi subsistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga subsistem tersebut merupakan satu kesatuan dan saling berinteraksi secara berkesinambungan dengan didukung oleh *input* sumber daya alam, kelembagaan, budaya, dan teknologi. Proses ini akan berjalan efisien jika didukung oleh partisipasi masyarakat dan sistem informasi komunikasi pertanian yang efektif.

Telah lama disadari bahwa pangan bukan saja berperan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menjadi komoditas sosial dan bahkan politik. Kondisi kritis akibat kekurangan pangan dan gizi dapat membahayakan stabilitas nasional dan meruntuhkan pemerintah yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, pangan sebagai kebutuhan dasar harus dapat dipenuhi setiap saat. Secara konstitusional, pangan diartikan lebih mendasar yakni sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 dan UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, aspek keamanan, mutu, dan keragaman pangan merupakan kondisi yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup, merata, dan terjangkau. Komitmen untuk mewujudkan kemandirian pangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025.

Swasembada Beras

Pemenuhan kebutuhan pangan nasional terutama beras telah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1950 dengan digulirkannya program Rencana Kesejahteraan Istimewa. Program tersebut diikuti dengan gerakan massal pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan Gerakan Swasembada Beras (SSB). Gerakan SSB dilaksanakan hingga tahun 1963 dilanjutkan dengan program Swasembada Bahan Makanan (SSBM) dan Bimbingan Massal (Bimas) atas dasar hasil penelitian Institut Pertanian Bogor di Karawang, Jawa Barat (Adjid 1998).

Usaha keras berbagai pihak tersebut mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun, sejak tahun 1988 Indonesia kembali mengimpor beras bahkan menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1998, yakni mencapai 5,40 juta ton (Yudhohusodo 2004). Menurut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, swasembada beras dapat dicapai kembali pada tahun 2008 dengan produksi padi sekitar 60,28 juta ton. Selama periode 2003–2008, produksi padi meningkat secara signifikan yakni 2,97%, dari 52,13 juta ton pada tahun 2003 menjadi 60,28 juta ton pada tahun 2008 (BPS 2008).

Kondisi ini perlu dievaluasi dan diwaspadai karena keberhasilan swasembada beras dipengaruhi berbagai faktor, yakni penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, pengembangan manajemen usaha tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta jaminan harga dasar. Karena banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian swasembada beras, kondisi ini akan selalu dibayangi oleh kekurangan beras setiap waktu. Pencukupan pangan setiap daerah sesuai dengan karakteristik wilayah merupakan pendekatan pembangunan swasembada beras yang perlu dipertimbangkan pemerintah terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Ketergantungan Pangan Impor

Pusat Data dan Informasi Pertanian (2007) melaporkan, produktivitas rata-rata padi nasional masih rendah yakni 4,62 t/ha. Sementara itu, impor bahan pangan lainnya, terutama gandum makin meningkat, dari 3,52 juta ton pada tahun 2003 menjadi 4,49 juta ton pada tahun 2006. Kecen-

derungan peningkatan impor bahan pangan nonberas menunjukkan kondisi ketidakmandirian pangan nasional atau ketahanan pangan makin bergantung pada bahan pangan impor.

Produksi padi

Revolusi hijau pada era 1960-an berhasil meningkatkan produktivitas padi secara spektakuler, luas panen bertambah, dan kehilangan hasil menurun sehingga berdampak terhadap kecukupan pangan dunia. Revolusi hijau berhasil mengembangkan berbagai teknologi, baik teknologi budi daya, teknologi kimiawi maupun mekanisasi pertanian.

Diketahui bahwa rata-rata produktivitas padi nasional masih rendah yakni 4,40 t/ha, sedangkan di beberapa negara seperti Australia telah mencapai 9,50 t/ha, Jepang 6,65 t/ha, dan Cina 6,35 t/ha. Rendahnya produktivitas padi nasional disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1) alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian (perumahan, industri), 2) peningkatan produktivitas mengalami stagnasi, 3) fragmentasi lahan sehingga meningkatkan jumlah petani gurem, 4) tenaga kerja usia muda makin enggan bekerja di sektor pertanian, dan 5) adopsi inovasi teknologi pertanian dan manajemen agribisnis berjalan lambat.

Potensi sumber daya pertanian Indonesia sangat besar sehingga terbuka peluang yang sangat luas untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dengan memperhatikan karakteristik daerah, baik fisik maupun sosial budaya. Beberapa faktor kunci yang berperan dalam mengembangkan usaha tani tanaman pangan khususnya padi adalah: 1) menjadikan pertanian sebagai basis pembangunan ekonomi pedesaan, 2) membangun usaha tani modern berbasis agribisnis, koperasi, dan karakteristik potensi sumber daya lokal atau daerah, dan 3) mengembangkan sistem komunikasi pembangunan pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber informasi. Usaha tani tradisional dengan berbagai kelemahannya perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumber daya alam dan pemberdayaan petani dengan memanfaatkan informasi teknologi tepat guna dan manajemen profesional secara efektif.

Kehilangan hasil

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi pangan, terutama padi, adalah adopsi inovasi teknologi. Penerapan teknologi pascapanen telah berhasil menekan kehilangan hasil dari 20,51% pada tahun 1995/1996 menjadi 10,82% pada tahun 2005–2007. Menurut BPS (2008), susut saat panen yang semula mencapai 10,12%, saat ini hanya 1,20%, terdiri atas susut panen 1,05% dan susut penumpukan sementara 0,15%. Susut saat perontokan menurun dari 4,78% pada tahun 1995/1996 menjadi 0,18% pada tahun 2005–2007. Namun, rendemen penggilingan gabah menjadi beras menurun menjadi 62,74% pada periode 2005–2007, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1995/1996 yang mencapai 63,20%. Perbandingan susut panen dan konversi gabah/beras pada tahun 1995/1996 dan 2005–2007 menurut kegiatan pascapanen disajikan pada Tabel 1.

Susut pengeringan mengalami peningkatan 1,14% dan konversi gabah kering panen menjadi gabah kering giling menurun 0,49%. Hal ini disebabkan sebagian besar petani masih melakukan pengeringan gabah dengan sinar matahari (dijemur) dan hanya sedikit yang menggunakan mesin pengering. Susut penggilingan meningkat 1,06% dan rendemen penggilingan menurun 0,46% karena mesin penggilingan relatif telah tua. Menurut BPS (2008), 32% penggilingan padi kecil (PPK) berumur lebih dari 15 tahun dan masih menggunakan konfigurasi sederhana dengan sistem satu fase atau satu kali penyosohan.

Pola makan

Pola makan masyarakat berubah secara cepat dengan meningkatnya konsumsi bahan pangan impor seperti gandum (mi instan), buah-buahan, dan daging. Menurut Pusat Data dan Informasi Pertanian (2007), pada tahun 1999 konsumsi beras nasional sekitar 111,49 kg/kapita/tahun dan menurun menjadi 96,67 kg/kapita/tahun pada tahun 2006 atau turun 4,82 kg/kapita/tahun. Konsumsi jagung, ubi kayu, dan ubi jalar meningkat pada tahun 2005, yakni masing-masing menjadi 4; 9,10; dan 3,60 kg/kapita/tahun. Konsumsi daging sapi baru mencapai 0,42 kg, daging ayam 3,79 kg, dan telur 5,15 kg/kapita/tahun.

Peningkatan konsumsi pangan nonberas dengan pola makan berimbang dengan bahan pangan dari dalam negeri akan mendorong pengembangan komoditas hortikultura, perikanan, dan peternakan. Di samping mempercepat adopsi inovasi teknologi dan manajemen agribisnis, pengembangan diversifikasi pangan dan dukungan etika pola pangan merupakan faktor penting dalam membangun kemandirian pangan berbasis pemberdayaan petani. Perkembangan konsumsi beberapa bahan pangan tahun 1996 dan 2005 disajikan pada Tabel 2.

Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada program yang bersifat pemberian (*charity*) karena tujuan akhirnya adalah

Tabel 1. Perbandingan susut dan konversi gabah/beras tahun 1995/1996 dan 2005–2007.

Kegiatan pascapanen	Susut dan konversi (%)		Perubahan (%)
	1995/1996	2005–2007	
Pemanenan	9,52 ¹	1,20 ¹	-3,20
Perontokan	4,78 ¹	0,18 ¹	-4,60
Pengeringan	2,13 ¹	3,27 ²	+1,14
Konversi GKP dan GKG	86,51	86,02	-0,49
Penggilingan	2,19 ²	3,25 ²	+1,06
Konversi GKP dan GKG (rendemen)	63,20	62,74	-0,46
Penyimpanan	1,61	1,39	-0,22
Pengangkutan	0,19	1,53	+1,34
Total	20,42	10,82	9,60

¹Persentase terhadap GKP, ²Persentase terhadap GKG.
Sumber: BPS (2008).

Tabel 2. Konsumsi bahan pangan, 1996 dan 2005.

Bahan pangan	Konsumsi (kg/kapita/tahun)	
	1996	2005
Beras	111,49	96,67
Jagung	3,74	4
Ubi kayu	7,96	9,10
Ubi jalar	2,96	3,80
Kacang tanah	1,14	0,99
Kacang kedelai	0,10	0,05
Telur	4,71	5,15
Susu murni	0,26	0,10
Daging ayam	1,25	3,79
Daging sapi	0,62	0,42

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanian (2007).

memandirikan masyarakat dan membangun kemampuannya untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Konsep pemberdayaan muncul pada dekade 1970-an dan berkembang terus sehingga menjadi alternatif konsep pembangunan terutama di negara-negara berkembang.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pembangunan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat sebagai bentuk kesadaran untuk membangun ketahanan pangan yang andal. Petani padi yang umumnya berskala kecil (gurem) hanya akan mempunyai daya saing jika mereka berada dalam suatu wadah atau lembaga ekonomi yang kuat dan mampu memadukan potensi kapital fisik dan sosial yang dimiliki (Soekartawi 1993).

Peran kelembagaan petani

Sumber daya pertanian mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital fisik dan teknologi, modal sosial dan kelembagaan. Sumber daya tersebut dapat dikembangkan sebagai kegiatan agribisnis untuk meningkatkan keberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan petani. Dalam era milenium ketiga atau globalisasi, yang ditandai adanya perubahan struktural masyarakat yang sangat mendasar terutama keterkaitan antarbangsa yang penuh dengan persaingan kompetitif, bangsa Indonesia perlu memiliki keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Prinsip usaha tani ke depan harus didasarkan pada efisiensi dan daya saing berdasarkan keunggulan kompetitif yang layak dan menguntungkan. Namun, proses perubahan tersebut harus didukung oleh kesiapan sosial setiap pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Pembangunan pertanian modern sebagai tuntutan perkembangan iptek dan globalisasi harus dipadukan dengan konsepsi dasar pembangunan ekonomi kerakyatan sebagai amanah konstitusi (UUD 1945), dan kelembagaan yang tepat bagi petani adalah koperasi. Keberadaan koperasi unit desa (KUD) perlu ditata ulang dengan pendekatan agribisnis dan sistem ekonomi kerakyatan (kebersamaan/kekeluargaan) sesuai dengan kepentingan usaha ekonomi petani. Koperasi komoditas tunggal seperti koperasi agribisnis padi, kedelai atau jagung berpeluang untuk bangkit mandiri berbasis pada kepentingan dan kekuatan anggota.

Peran modal sosial

Negara-negara yang berhasil dalam pembangunan ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di bidang sosial. Menurut Mubyarto (2004), seorang pakar Bank Dunia menyatakan secara tegas bahwa pembangunan sosial merupakan pembangunan ekonomi, yang berarti pembangunan di bidang sosial memiliki posisi sama penting dengan pembangunan ekonomi. Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat harus dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi sumber daya sebagai modal sosial yang ada di masyarakat. Menurut Putnam *et al.* (1993), ada tiga elemen utama dalam modal sosial, yaitu rasa saling percaya (*trust*), norma yang disepakati dan ditaati (*social norms*), dan jaringan hubungan sosial (*social network*). Ketiga aspek ini penting artinya dalam membangun komunikasi partisipatif dalam upaya mempercepat pemberdayaan masyarakat.

Bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk terkandung makna kesatuan di antara kebinekaan (*diversity*) dan kekhasan (*uniqueness*) sehingga kebinekaan dalam persatuan menjadi tuntutan karakter komunitas yang dinamis untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan tidak mengorbankan kepentingan individu. Oleh karena itu, apa yang menjadi

kesamaan (*what is common to all*) merupakan aspek yang mendasar dalam menjalin saling ketergantungan yang menguntungkan sehingga tercipta kekuatan yang bersifat sinergis sebagai energi sosial masyarakat. Perpaduan potensi kapital fisik dan kapital sosial yang dimiliki masyarakat merupakan kekuatan atau energi yang besar dalam pembangunan (Lawang 2005). Energi sosial masyarakat terdapat di antara unit-unit sosial yang ada di masyarakat, keluarga, rukun tetangga, himpunan, kelompok, asosiasi, atau unit sosial lain. Energi sosial itu meliputi seluruh elemen sosial, potensi kreatif masyarakat, serta prakarsa dan gagasan yang berkembang di masyarakat, yang semuanya itu bisa digalang sebagai kekuatan pembangunan pertanian.

STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi mendapat perhatian yang besar dalam rangka mendorong pembangunan nasional di banyak negara. Strategi adalah cara atau taktik untuk mencapai tujuan atau suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, termasuk taktik operasionalnya. Secara sederhana, strategi komunikasi dapat dirumuskan dengan mengkaji secara mendalam teori Lasswell yang mencakup: *Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?* Untuk berkomunikasi secara tepat sesuai dengan media yang ada, dapat digunakan komunikasi tatap muka dan komunikasi dengan media. Komunikasi tatap muka berperan dalam mengubah tingkah laku, dan komunikasi bermedia untuk komunikasi informatif (Muhammad 2004).

Peran Komunikasi Pertanian

Revolusi teknologi informasi yang dimulai sejak peluncuran satelit komunikasi pada akhir tahun 1960-an, telah mendorong pergerakan yang sinergis antara teknologi telekomunikasi dengan teknologi komputer dan internet. Perkembangan tersebut selanjutnya mempengaruhi orang dalam berkomunikasi, bertukar informasi maupun beraktivitas ekonomi sebagai bagian dari perubahan peradaban dunia. Teknologi komunikasi modern seperti surat kabar, radio, televisi, video, komputer, dan satelit menawarkan berbagai kelebihan untuk mengatasi hambatan

transformasi informasi yang dibutuhkan petani. Karena itu, teknologi komunikasi menjadi suatu kebutuhan dalam menyampaikannya informasi yang bermanfaat bagi petani.

Teknologi komunikasi tidak hanya membuat sesuatu menjadi lebih mudah dan lebih cepat, atau lebih efisien, tetapi juga membangun wawasan dan pengetahuan global petani tentang perkembangan pertanian, baik lokal, nasional maupun internasional. Menurut Soekartawi (1988), pesan dalam komunikasi pertanian dapat berupa informasi tentang: 1) peningkatan produksi, 2) pemeliharaan kondisi lahan, 3) penanganan pascapanen, 4) adopsi teknologi baru, 5) kerja sama kelompok, 6) peningkatan pendapatan rumah tangga, dan 7) partisipasi dalam kegiatan pedesaan. Komunikasi pertanian bukan saja bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku komunikasi seperti yang sering ditemui dalam penyuluhan pertanian yang lebih banyak dikuasai oleh kekuatan komunikator (komunikasi satu arah), tetapi juga perlu memperhatikan peran komunikasi baik sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dikenal dengan komunikasi dua arah.

Menurut Kaye (1997), setiap manusia akan mampu mengenali inti permasalahan yang dihadapi bila memiliki informasi yang memadai, dan untuk memperolehnya dibutuhkan sumber daya dan akses terhadap sumber informasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyediaan informasi adalah relevansi, akurasi, kelengkapan, ketajaman, ketepatan waktu, dan keterwakilan. Perkembangan peran komunikasi dalam pembangunan pertanian telah menimbulkan pergeseran paradigma, yakni dari komunikasi satu arah menjadi dua arah di mana komunikasi dan komunikator saling menghargai aspirasi dan kepentingannya dalam proses komunikasi tersebut.

Menurut Melkote (2007), pakar komunikasi Rogers memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan komunikasi pembangunan pertanian melalui berbagai penelitian tentang difusi inovasi, partisipasi, pemberdayaan, dan perubahan sosial masyarakat. Pemberdayaan petani dan masyarakat pada lingkungan sosial, ekonomi, dan realitas politik berkaitan dengan pendidikan keahlian untuk mengembangkan komunikasi antarpekerja atau petani. Jika pengembangan komunikasi berlanjut secara efektif dalam proses perubahan sosial, peneliti dan partisipan

harus mengutamakan pemecahan masalah hubungan kemampuan yang tidak seimbang.

Adopsi Inovasi Teknologi

Berbagai teknologi dan inovasi pertanian telah dihasilkan dan layak secara teknis dan ekonomis, namun belum tentu teknologi dan inovasi tersebut diterima dan diterapkan oleh petani. Oleh karena itu, perlu pengkajian tentang adopsi inovasi untuk merancang strategi yang efektif agar target sasaran dapat menerapkan inovasi baru yang memiliki prospek lebih baik. Adopsi inovasi pertanian pada dasarnya menyangkut proses pengambilan keputusan oleh pengguna teknologi atau ide-ide baru untuk menerima atau menolaknya untuk mengembangkan usaha taninya (Soekartawi 1993).

Rogers dan Shoemaker (1971) menyatakan bahwa adopsi merupakan upaya menyampaikan secara bertahap ide, praktek atau objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat tani. Secara sederhana, adopsi inovasi terjadi melalui proses yakni: kesadaran, tumbuh minat, evaluasi, mencoba, dan adopsi. Kecepatan proses adopsi inovasi bervariasi, yaitu sangat cepat, lambat, atau menolak, dan dapat dikategorikan menjadi kelompok pengadopsi berdasarkan status sosial, status ekonomi, perilaku komunikasi, pendidikan, dan umur. Berdasarkan kecepatan adopsi, kelompok pengadopsi dapat dibedakan sebagai perintis (*innovators*), pengetrap dini (*early adopters*), pengetrap mayoritas awal (*early majority*), pengetrap mayoritas akhir (*late majority*), dan penolak atau kaum kolot (*laggard*).

Beberapa faktor produksi yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas komoditas pangan meliputi varietas unggul, lahan, teknik budi daya (ketersediaan pupuk/pestisida serta alat dan mesin pertanian), dan teknologi pascapanen. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas bahan pangan, petani sebagai tulang punggung pertanian Indonesia membutuhkan teknologi yang sederhana, murah, dan efisien. Namun, kemampuan petani untuk mengakses teknologi alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor roda dua dan empat, pompa air, alat tanam padi, pengering, dan alat perbengkelan masih terbatas. Di sisi lain, alsintan dibutuhkan

untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di pedesaan.

Sistem Informasi Komunikasi Pertanian

Beberapa negara di Asia telah berhasil mengembangkan sistem informasi komunikasi pertanian sebagai manifestasi kemajuan iptek yang bersumber pada kreativitas inovatif suatu bangsa, misalnya program *Thalad Thai* di Thailand, gerakan *Semaui Undong* di Korea Selatan, dan pembangunan pertanian modern pascaperang dunia kedua di Jepang. Di Indonesia, sejak tahun 2004 Departemen Pertanian mengembangkan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani). Program ini dilaksanakan secara partisipatif oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan pertanian dalam bentuk laboratorium agribisnis. Prima Tani bersifat integratif secara vertikal dan horizontal, dan diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang bermuara pada ketahanan pangan, daya saing melalui peningkatan nilai tambah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai gerakan pembaharuan usaha tani tersebut, terlihat bahwa komunikasi berperan sebagai salah satu program pendukung yang penting (Suryana 2008).

Setiap program pembangunan yang terkait dengan pembangunan pertanian memerlukan perencanaan yang komprehensif dengan koordinasi semua pihak melalui sistem informasi yang efektif dan efisien. Informasi bagi pengembangan usaha tani modern merupakan sumber daya penting dalam kegiatan produksi dan manajemen agribisnis untuk meningkatkan daya saing. Informasi yang dibutuhkan petani dapat disalurkan melalui sistem informasi dengan mengacu pada *computer-based system* untuk mendukung operasi, manajemen, dan fungsi keputusan dalam organisasi. Akses petani terhadap sumber informasi perlu ditingkatkan sehingga petani dapat mengambil keputusan secara tepat.

Sistem informasi komunikasi pertanian berperan untuk mengumpulkan, mengirimkan, memproses, dan menyimpan data tentang sumber daya organisasi, program, dan pencapaian kinerja atau prestasi. Informasi merupakan data yang memiliki makna dan berguna, serta dapat dikomunikasikan kepada penerima atau pengguna

(*stakeholders*) untuk membuat suatu keputusan. Setiap manajer dan partisipan yang terkait dalam pengembangan usaha tani padi (koperasi, swasta, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan), pada berbagai level memerlukan informasi yang relevan dalam rangka membuat keputusan yang efektif.

Sistem Kemitraan

Pewujudan sistem informasi dalam mendukung program kemandirian pangan memerlukan pemberdayaan petani melalui organisasi ekonomi yang mampu menggalang potensi faktor produksi yang terbatas. Koperasi pertanian merupakan lembaga ekonomi yang sesuai bagi petani dan juga merupakan amanah konstitusi UUD 1945 yang perlu ditata ulang seiring dengan perkembangan iptek dan tantangan global yang makin kompleks. Perpaduan prinsip agribisnis dan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan dan kebersamaan dapat dikembangkan sebagai paradigma baru dalam pengembangan koperasi yang efektif dan efisien dan berpihak kepada kepentingan anggota (petani).

Untuk membangun koperasi yang efektif dan efisien, model koperasi pertanian komoditas tunggal merupakan alternatif yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pembangunan usaha tani modern dengan dukungan sistem informasi komunikasi pertanian. Koperasi komoditas tunggal yang berorientasi pada keberdayaan dan kesejahteraan petani serta kemandirian pangan, akan mendorong munculnya koperasi pertanian yang andal.

Komunikasi pertanian menjadi makin penting untuk menghasilkan keseimbangan dalam perspektif pertukaran informasi melalui jalur kelembagaan yang mapan, didukung dengan komunikasi dua arah, baik vertikal maupun horizontal dalam sistem sosial pertanian. Interaksi horizontal harus dikembangkan menjadi interaksi solidaritas dan kemitraan, yang terkait dengan kehidupan antaranggota, antarkelompok, atau antarlembaga dalam masyarakat. Sinergi kapital masyarakat, baik kapital fisik maupun kapital sosial dari seluruh partisipan melalui sistem kemitraan perlu diintegrasikan menjadi kekuatan yang lebih efektif.

Penguatan koperasi pertanian dapat mengembangkan sistem kemitraan dengan

pelaku ekonomi pertanian lainnya dalam posisi yang berimbang. Kemitraan juga penting untuk membangun sistem agribisnis dengan posisi tawar dan daya saing yang tinggi serta untuk memperoleh nilai tambah yang wajar bagi petani. Untuk membangun usaha tani padi dengan dukungan koperasi pertanian, diperlukan analisis potensi sumber daya lokal sebagai kawasan pengembangan agribisnis yang didukung oleh studi kelayakan secara sosial, teknis maupun ekonomi. Pengembangan koperasi pertanian yang kokoh dapat mengantisipasi kekuatan ekonomi kapitalis yang bertentangan dengan sistem ekonomi kerakyatan. Potensi dan karakteristik masing-masing daerah dapat diperoleh melalui analisis berdasarkan kawasan pengembangan agribisnis komoditas unggulan. Kemandirian pangan dapat dibangun berdasarkan Kawasan Pengembangan Agribisnis (KPA) padi, dengan dukungan Koperasi Agribisnis Padi, Pusat Informasi Agribisnis Padi, dan Sistem Kemitraan Agribisnis Padi yang melibatkan seluruh *stakeholders* secara terpadu.

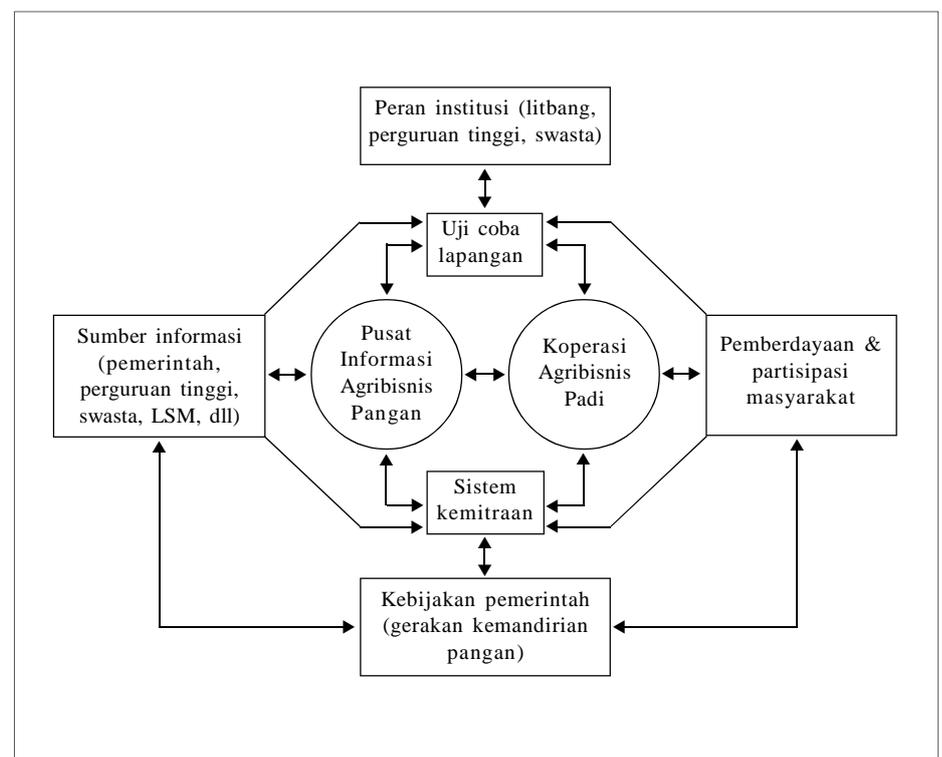
Informasi dari lembaga formal dan nonformal untuk membangun usaha tani padi modern dapat disalurkan melalui Pusat Informasi Agribisnis padi yang berfungsi sebagai penyaring informasi sesuai

dengan kebutuhan petani. Lembaga ini mempunyai tiga kelompok kegiatan, yakni: 1) melakukan uji lapangan bersama lembaga penelitian, 2) melakukan penyuluhan dua arah bersama dengan lembaga penelitian, dan 3) menyalurkan informasi yang terkait langsung dengan kebutuhan petani melalui koperasi agribisnis. Dukungan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan harus menjadi komitmen politik sebagai gerakan nasional dengan sistem kemitraan yang dilandasi kesadaran pentingnya kemandirian pangan menuju ketahanan pangan yang andal. Bagan strategi komunikasi kemandirian pangan dapat dilihat pada Gambar 1.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kemandirian pangan bergantung pada keberdayaan petani dalam meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan nilai tambah sehingga mempunyai posisi tawar dan daya saing yang tinggi. Untuk mewujudkannya diperlukan dukungan akselerasi adopsi inovasi teknologi pertanian. Pemberdayaan petani padi dapat



Gambar 1. Bagan strategi komunikasi kemandirian pangan.

dilakukan melalui pengembangan koperasi agribisnis dengan pendekatan kemandirian dan daya saing melalui pengembangan sentra-sentra produksi komoditas pangan unggulan atau kawasan pengembangan agribisnis pangan.

Peran komunikasi pembangunan dalam transformasi teknologi dan manajemen agribisnis belum efektif dan efisien. Masih terjadi kesenjangan antara kemajuan iptek di tingkat penelitian dan aplikasinya di lapangan. Sinergi dari partisipan dalam membangun kemandirian pangan juga belum berkembang.

Implikasi Kebijakan

Swasembada beras dan diversifikasi pangan sebagai basis kemandirian pangan harus dikembangkan menjadi gerakan masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal potensi sumber daya lokal (fisik dan sosial) untuk menghindari ketergantungan pada pangan impor. Sistem agribisnis pangan (padi) dalam wadah koperasi agribisnis padi perlu dibangun sebagai bentuk pembangunan kemandirian pangan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pengembangan sistem ekonomi

kerakyatan untuk mengantisipasi perekonomian global yang cenderung kapitalis (neoliberalisme).

Perlu dikembangkan strategi komunikasi pembangunan kemandirian pangan dalam suatu sistem informasi komunikasi pembangunan usaha tani padi dalam setiap kawasan pengembangan agribisnis padi. Pengembangannya dapat dilakukan dengan pendekatan sistem kemitraan dan pemberdayaan secara terpadu (pemerintah, swasta, koperasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM) berbasis koperasi dan sumber daya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D.A. 1998. *Membangun Pertanian Modern. Pengembangan Sinar Tani*, Jakarta.
- Alimoeso, S. 2008. *Ketahanan pangan nasional: Antara harapan dan kenyataan. Makalah disampaikan pada Pameran Agrinex di Jakarta, Maret 2008.*
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. *Statistik Pertanian*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2003. *Trade Reform and Food Security: Conceptualizing the Linkages*. FAO, Rome.
- Kartasasmita, G. 1996. *Power and Empowerment: Sebuah telaahan mengenai konsep pemberdayaan masyarakat*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kaye, H. 1997. *Mengambil Keputusan Penuh Percaya Diri*. Mitra Utama, Jakarta.
- Lawang, R.M.Z. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Cetakan Kedua. UI Press, Jakarta.
- Melkote, R.S. 2007. *Everett M Rogers and his contribution to the field of communication and social change in developing countries*. *Journal of Creative in Communication* 1:1 2006. Sage Publication, New Delhi. Thousand Oaks, London.
- Mubyarto. 2004. *Kualitas manusia Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Edisi Agustus 2004. Yayasan Agro Ekonomika, Bogor.
- Muhammad, A. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nainggolan, K. 2007. *Perberasan sebagai bagian dari ketahanan nasional di bidang pangan*. Seminar Sehari tentang Perberasan. *Harian Umum Sinar Harapan dengan Tabloid Agrina*, Jakarta.
- Pakpahan, A. 2004. *Petani Menggugat*. Max Havelaar Indonesia Foundation, Jakarta.
- Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2007. *Statistik Pertanian*. Pusat Data dan Informasi Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Putnam, R.D., R. Leonardi, and R.Y. Nanetti. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. Princeton, USA.
- Rogers, E.M. and F.F. Shoemaker. 1971. *Communication of Innovations, A Cross-Cultural Approach*. The Free Press, New York. 476 pp.
- Soekartawi. 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. UI Press, Jakarta. hlm. 137.
- Soekartawi. 1993. *Peranan pengembangan sumber daya manusia (PSDM) dalam proses adopsi-inovasi untuk meningkatkan pendapatan petani*. *Agro-Ekonomika* 23(1): 23-42.
- Suryana, A. 2008. *Penganekaragaman pangan dan gizi: Faktor pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia*. *Majalah Pangan. Media Komunikasi dan Informasi*. No. 52/XVII/Oktober-Desember 2008, Jakarta.
- Yudhohusodo, S. 2004. *Membangun Kemandirian Pangan*. Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.